

5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu mengukur dan menganalisis besarnya drajat desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia, mengukur dan menganalisis skor efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia, dan menganalisis pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap penyediaan barang publik menggunakan data panel agregat 33 provinsi di Indonesia. Dari ketiga tujuan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini dirangkum kedalam 3 poin:

1. Secara umum indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia masih terbilang cukup rendah dengan rata-rata sebesar 0,09 (skala 0-1) selama tahun 2012-2014. Walaupun cukup rendah indeks desentralisasi fiskal masing-masing provinsi tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2012-2014
2. Mayoritas masing-masing provinsi di Indonesia memiliki skor efisiensi penyediaan barang publik provinsi yang cukup tinggi yaitu dengan rata-rata 80 persen (skala 0-100%) selama tahun 2012-2014. Skor efisiensi penyediaan barang publik tersebut menurun selama tahun 2012-2014. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki skor efisiensi dengan rata-rata hanya sebesar 23% selama tahun 2012-2014. Hal ini dapat dikatakan bahwa DKI Jakarta tidak efisien dalam menggunakan anggarannya. Skor efisiensi penyediaan barang publik di provinsi DKI Jakarta rendah mungkin disebabkan karena sebagian besar pengeluaran provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai biaya operasional bukan digunakan untuk membangun fasilitas publik. Selain itu pemilihan input dan output dalam analisis DEA juga dapat mempengaruhi besarnya skor efisiensi yang dihasilkan.
3. Secara statistik indeks desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi penyediaan barang publik. Namun arah pengaruhnya negatif. Artinya ketika terjadi kenaikan indeks desentralisasi fiskal sebesar satu persen justru akan menurunkan tingkat efisiensi penyediaan barang publik. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diungkapkan oleh Tiebout (1956). Selain itu variabel lain yang ikut mempengaruhi tingkat efisiensi penyediaan barang publik adalah karakteristik daerah regional masing-masing provinsi di Indonesia kecuali karakteristik provinsi DKI Jakarta.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan indeks desentralisasi fiskal *The Enhance of Fiscal Decentralization Index* (EFDI). Pengukuran mengenai indeks desentralisasi fiskal sangatlah banyak, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengukur indeks desentralisasi fiskal dengan ukuran yang berbeda.
2. Variabel dalam analisis DEA untuk mengukur skor efisiensi penyediaan barang publik dalam penelitian ini menggunakan variabel input yang terdiri dari jumlah PNS dan total belanja regional provinsi. Sementara itu variabel outpunya berupa adalah jumlah sekolah negeri, jumlah rumah sakit publik, jumlah, jumlah posyandu, jumlah puskesmas, panjang jalan, dan jembatan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel input dan output yang lain untuk menentukan skor efisiensi penyediaan barang publik yang sesuai.
3. Penelitian selanjutnya mengenai desentralisasi fiskal dapat diteliti dengan lingkup yang lebih kecil misalnya antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kota/kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, G. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Lembaga Studi Komunikasi Pembangunan Indonesia (LSKPI).
- Badan Pusat Statistik. (2015, September 8). *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin*. Retrieved Agustus 30, 2016, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1163>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Davoodi, H., Zou, H.-F., & Xie, D. (1998). Fiscal decentralization and economic growth in the united states. *Journal of Urban Economics*, 45, 228-239.
- Departemen Keuangan Indonesia. (2010). *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Indonesia.
- Dziobek, C., Mangas, C. G., & Kufa, P. (2010). Measuring Fiscal Decentralization - Exploring the IMF's Databases. *IMF Working Paper WP/11/126*. Internasional Monetary Fund.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). On the measurement and impact of fiscal decentralization. *The World Bank*, 1-26.
- Hermawan, P. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Belanja Pemerintah Sektor Publik (Studi Kasus: 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2006-2010)*. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Jonathan, G. (2011). *Public Finance and Public Policy* (3rd ed.). New York: Worth Publisher.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015, Agustus 28). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Retrieved November 14, 2016, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). *Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). *Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2012). *Indonesia Educational Statistics in Brief 2011/2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). *Indonesia Educational Statistics in Brief 2012/2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2014). *Indonesia Educational Statistics in Brief 2013/2014*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015). *Indonesia Educational Statistics in Brief 2014/2015*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mangkoesebroto, G. (2014). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Oates, W. (1972). The role of fiscal decentralization in economic growth. *Reprinted by The National Tax Journal*, 46(2).
- Ramanathan, R. (2003). *An Introduction to Data Envelopment Analysis*. New Delhi: Sage Publication.
- Robalino, D., Picazo, O., & Voetberg, A. (2001). Does Fiscal Decentralization Improve Health Outcomes? Evidence from a Cross-Contry Analysis. The World Bank Policy Research Working Paper 2565 .
- Rochana, S. H. (2009). *Desentralisasi Fiskal, Teori, dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Syaukani, H., Gaffar, R., & Rasyid, M. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditure. *The Journal Political Economy*, 64(5), 416-424.
- Tirtosuharto, D. (2006). *Regional Competitiveness in Indonesia: The Incentives of Fiscal Decentralization on State Efficiency and Economic Growth*. Fairfax, Virginia: George Mason University.
- Ulbrich, H. H. (2011). *Public Finance in Theory and Practice* (2nd ed.). New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Vo, D. H. (2008). *The Economics of Measuring Fiscal Decentralization*. The University of Western Australia.